BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agenda perluasan Uni Eropa telah dimulai sejak tahun 2004 sebagai satu langkah besar dalam menjamin kesejahteraan negara negara di kawasan Eropa. Sejak tahun 2004, sepuluh negara dikawasan Eropa telah bergabung dengan Uni Eropa yaitu: Hungaria, Polandia, Slovenia, Republik Czech, Republik Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, dan Siprus. Dari perluasan yang dilakukan Uni Eropa sejak 2004, salah satu calon anggota yang sampai saat ini belum juga masuk kedalam blok tersebut adalah Turki, dalam banyak kasus Turki dipandang belum memenuhi kriteria untuk masuk kedalam Uni Eropa (Scherle, 2014).

Proses Turki untuk masuk Uni Eropa dilakukan sejak tahun 1997 sebagai negara yang dapat menjadi anggota Uni Eropa. Pada pada tahun 1999 Turki dinyatakan sebagai calon anggota, namun proses negosiasi baru dibuka pada tahun 2005 dan sempat terhenti pada tahun 2006 kemudian berlanjut hingga pada tahun 2016. Negosiasi Turki berhenti sampai saat ini (European Commission, 2016). Selain karena kriteria yang belum terpenuhi, beberapa negara seperti Jerman, Siprus, Austria dan Prancis masih menolak masuknya Turki di Uni Eropa (Narulita, 2016). Pada dasarnya negara negara di Uni Eropa juga melakukan pelanggaran HAM atas diskriminasi seperti fenomena berkembangnya gerakan *xenophobia* atau *Islamophobia* (Marozzi, 2015). Fenomena tersebut menjelaskan bahwa negara negara

anggota Uni Eropa sendiri belum mampu secara sempurna menerapkan kriteria kopenhagen.

Kerjasama Turki dan negara negara Uni Eropa selama ini terus berjalan terutama kerjasamanya dengan Jerman. Jerman merupakan mitra dagang utama yang cukup berpengaruh dalam perekonomian Tukri begitu juga bagi Jerman (Seufert, 2015, hal. 5). Jerman merupakan salah satu negara di Uni Eropa yang selama beberapa dekade ini menjadi kekuatan yang dominan. Kekuatan Jerman di Eropa semakin tinggi sejak keluarnya Inggris dari blok tersebut (Gardiner, 2015). Selain karena kriteria Uni Eropa belum di selesaikan oleh Turki. Masalah bilateral dengan Jerman dalam beberapa bidang kerja sama membuatnya semakin sulit karena Jerman merupakan jembatan kerja sama antara Turki dan Uni Eropa. Jerman sendiri merupakan jembatan dalam kerja sama antara Turki dan Uni Eropa (Christiastuti, 2017). Dalam proses negosiasi yang sedang berjalan, Jerman menyatakan penolakanya untuk menjadikan Turki bagian dari Uni Eropa. Penentangan Jerman bukan tanpa alasan, arah politik Turki baik domestik maupun kebijakan luar negerinya mengalami perubahan yang cukup besar dan kondisi Uni Eropa sangat sulit untuk mengintegrasikan Turki di organisasi tersebut (Nursya'bani, 2017).

Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) yang dipimpin oleh Recep Tayyib Erdogan memenangkan pemilu dan Erdogan menjadi perdana menteri. Pemilu pada tahun 2002, 2007, 2011, 2015, 2016 selalu dimenangkan oleh partai AKP dan mempertahankan posisi Erdogan sebagai perdana menteri (Arifin, 2015). Sampai

pada tahun 2014, Turki mengadakan pemilu presiden secara langsung untuk pertama kalinya dan Recep Tayib Erdogan dari AKP terpilih sebagai presiden (Özbudun, 2014, hal. 2).

Kepemimpinan Erdogan bersama AKP telah membuat Turki semakin maju, namun kebijakanya banyak ditentang oleh negara negara di Eropa. Salah satunya adalah kebijakan Referendum konstitusional Turki pada tahun 2017 (Werz, 2017). Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan bahwa Turki tidak harus menjadi anggota penuh di Uni Eropa. Jerman memandang Turki saat ini telah menjauh dari kriteria Uni Eropa sejak kepemimpinan presiden Erdogan. Menurut Merkel, Turki lebih menunjukan solidaritasnya kepada negara negara muslim dibanding negara negara di Uni Eropa dan jajak pendapat publik di Turki menunjukan perkembangan euroskeptis (Morelli, 2013, hal. 14).

Aksesi Turki ke Uni Eropa berpotensi memberi keuntungan bagi Uni Eropa dalam segi ekonomi dan keamanan. Dalam segi ekonomi, Pertumbuhan GDP per kapita Turki dari tahun 2002-2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 3.134 menjadi 14.933 USD (Trading Economics, 2018). Banyaknya populasi di Turki dengan usia produktif juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil (CIA, 2018). Selain itu, Turki memiliki aliran bahan mentah, sumber energi, dan tenaga kerja murah dibanding masyarakat Eropa. posisi geografis Turki di perbatasan Eropa dan Asia memberi keuntungan bagi Eropa sebagai penghubung antara Eropa dan Asia. Salah satu keuntungan geografis adalah Pipa minyak Baku-Jeyhan yang

akan membawa minyak Azerbaijan ke pantai Mediterania Turki melalui Georgia. Azerbaijan dengan cadangan minyak yang sangat melimpah berencana memasarkan cadangan energinya ke pasar dunia melalui Georgia dan Turki (Adnan, 2012, hal. 166). Dalam hal ini Turki akan menjadi poros penting untuk menghubungkan Uni Eropa dan negara negara di Asia.

Dalam bidang keamanan, Turki akan menjadi negara yang mampu menghambat masuknya imigran Timur Tengah ke Uni Eropa, sebagaimana kerja sama yang dilakukan Uni Eropa dengan Turki pada tahun 2015, Turki mampu menghentikan imigran yang akan pergi ke Uni Eropa (The Federal Chanselor , 2015). Stabilitas Turki menjadi kondisi yang penting bagi Uni Eropa untuk menangani masalah imigran dan menghambat perluasan konflik dari Timur Tengah ke Uni Eropa. untuk menjadi negara yang dianggap penting bagi Uni Eropa, Turki harus tetap stabil dalam bidang politik dan ekonomi serta meningkatkan kualitas masyarakat Turki agar mampu bersaing di Eropa.

Penting atau tidaknya Turki bagi Uni Eropa merupakan pandangan yang bergantung pada usaha Turki dalam melakukan integrasi dan kondisi sosio-politik di Uni Eropa. Sisi positif dari bergabungnya Turki cukup penting bagi Uni Eropa, mekipun Turki akan menjadi pihak yang paling beruntung. Disisi lain efek negatif dari bergabungnya Turki juga tidak kalah besar, baik itu karena Turki yang tidak mampu memenuhi kriteria ataupun hubungan sosio-politik Turki dengan Jerman dan Uni Eropa yang memang sulit diintegrasikan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, telah dijelaskan bahwa Jerman adalah salah satu negara yang menolak keanggotaan Turki di Uni Eropa. Sebagai negara super power di blok tersebut, penolakan Jerman merupakan keputusan penting yang sangat berpengaruh pada nasib Turki sebagai calon anggota Uni Eropa. sehingga penulis akan menjawab pertanyaan **"Mengapa Jerman Menolak Turki menjadi anggota Uni Eropa? (2005-2017)"**

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditentukan, Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pandangan Jerman dalam melihat aksesi Turki di Uni Eropa.
2. Untuk memahami faktor faktor penolakan Jerman terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa.
3. Untuk memberi pengetahuan yang luas bagi penulis dalam memahami proses keanggotaan Turki di Uni Eropa sejak Recep Tayyib Erdogan memimpin.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Jerman merupakan salah satu pendiri Uni Eropa dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa. Penolakan Jerman terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa merupakan keputusan Jerman yang dilakukan untuk melindungi stabilitas Uni Eropa

dan keputusanya sangat mempengaruhi hasil dari negosiasi di Uni Eropa. Sebagian besar penelitian hanya melihat masalah aksesi Turki di Uni Eropa dari sudut pandang Turki (Morelli, 2013), atau fokus pada masalah islamophobia di Eropa sebagai penyebab penolakan Turki di Uni Eropa (Arif, 2015), atau bahkan membahas tantangan Turki dalam proses integrasinya ke Uni Eropa (Senem, Anne, Daniela, Fuat, Nathalie , 2013). Belum ada penelitian yang melihat pandangan Jerman terhadap Turki dalam usahanya menjadi anggota Uni Eropa sehingga Jerman menolak Turki menjadi anggota Uni Eropa.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini secara umum akan membahas proses keanggotaan Turki di Uni Eropa sejak tahun 2005 sampai tahun 2017. Fokus penelitian dari 2005 sampai 2017 dikarena pada tahun 2005 pembukaan negosiasi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa dimulai. Secara khusus penelitian ini akan fokus pada penolakan Jerman sebagai negara *super power* di Uni Eropa dan memiliki hubungan bilateral yang intens dengan Turki.

1.6 Kajian Pustaka

Menurut Vincent L. Morelli (2013) menjelaskan tentang proses negosiasi Turki untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa dan sekilas menjelaskan dukugan Amerika Serikat terhadap aksesi Turki di Uni Eropa. Penelitian ini merupakan deskripsi perjalanan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa, didalamnya tertulis beberapa hasil negosiasi yang dilakukan (Morelli, 2013, hal. 1-16). Penelitian

tersebut dilakukan dengan sudut pandang Turki yang berusaha menjadi anggota Uni Eropa. Untuk melengkapi penelitian tersebut, penulis akan melihat dari sudut pandang Jerman yang menolak keanggotaan Turki di Uni Eropa.

Menurut Senem Aydin, dkk (2013) tantangan yang harus dihadapi oleh Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa adalah memenuhi kriteria kopenhagen. Tantangan yang sulit untuk dipenuhi oleh Turki adalah kriteria demokrasi dan perlindungan suku minoritas. Disebutkan dalam bukunya bahwa tantangan tersebut menjadi alasan utama dari Uni Eropa untuk menunda aksesi Turki (Senem, Anne, Daniela, Fuat, Nathalie , 2013, hal. 85-187). Kriteria kopenhagen bukan satu satunya alasan penolakan aksesi Turki ke Uni Eropa. Oleh karenanya penelitian ini akan melengkapinya dengan menjelaskan tentang kriteria *Acquis* dan alasan penolakan lain dengan melihat hubungan intersubjektif Jerman dan Uni Eropa dengan Turki.

Nuraeni (2017) menjelaskan Regionalisme di Eropa, mulai dari sejarah terbentuknya Uni Eropa, perangkat yang ada didalamnya, dan sistem perluasan Uni Eropa (Arfin and Nuraeni and Deasy , 2017, hal. 137-154), hal hal yang sifatnya prosedural yang dibahas dalam bukunya sangat berguna bagi penelitian ini untuk melihat pembentukan identitas Uni Eropa dan prosedur pembuatan keputusan serta mnjelaskan kriteria kopenhagen yang menjadi syarat utama bagi calon anggota.

Menurut Mohammad Qobidl ‘Ainul Arif, M.A. (2015) kehidupan masyarakat internasional di Eropa mempunyai rasa sentimen terhadap umat Muslim. Bukunya mengkaji bagaimana kemudian sentimen akan umat islam ini mempengaruhi proses

keanggotaan Turki di Uni Eropa. Dalam buku tersebut dijelaskan empat hal penting yang menciptakan islamophobia dan mempengaruhi aksesi Turki yaitu: masuknya sentimen keagamaan ditengah pembangunan identitas masyarakat Eropa, latar belakang sejarah Turki, Hegemoni kristen dalam budaya Eropa, dominasi ideologi liberal di Uni Eropa. Meskipun buku ini juga menjelaskan penyebab lain Turki sulit memasuki blok Uni Eropa, namun fokus buku ini memandang bahwa Turki belum dapat masuk Uni Eropa karena identitas dan budaya yang berbeda. (Arif, 2015, hal. 1-7) Dalam hal ini, penulis memposisikan diri sebagai pelengkap penelitian tersebut untuk melihat dari sudut pandang Jerman karena negara negara anggota Uni eropa memiliki alasan yang berbeda dalam menanggapi aksesi Turki sehingga tidak hanya masalah keislam di Turki.

menurut Anton Minardi (2017) keanggotaan Turki di Uni Eropa telah berlangsung sangat lama dan berbeda dengan negara calon anggota lain seperti Bulgaria dan Kroasia. Keanggotaan Turki Di Uni Eropa mengalami beberapa masalah terkait kriteria uni Eropa seperti kasus suku minoritas Kurdi di Turki yang dianggap menyalahi kriteria kopenhagen dari Uni Eropa dan kebijakanya terhadap krisis Syprus. Penelitian ini fokus membahas tentang usaha Turki masuk Uni Eropa sejak awal dan hambatanya serta Amerika Serikat yang mendukung perkembangan Turki sebagai calon anggota Uni Eropa (Minardi, 2017, hal. 125-135). Berbeda dengan penelitian tersebut yang fokus pada krisis syprus dan Kurdi sebagai hambatan aksesi Turki di Uni Eropa, penulisan ini akan fokus pada faktor faktor yang membuat Turki sulit menjadi anggota Uni Eropa dari sudut pandang Jerman.

1.7 Landasan Konseptual

Konstruktivisme Sistemik

Konstruktivisme sistemik merupakan model pengembangan teori Konstruktivis dari Alexander Wendt yang mengadopsi prespketif neo-realis dalam "Third-image". Wendt fokus pada interaksi antar aktor negara dan tidak menjadikan ranah domestik sebagai kekuatan utama dalam menganalisa tindakan suatu aktor (Reus Smit and Christian, 2005, pp. 199-201). Teori ini lahir sebagai pembaharuan terhadap teori sebelumnya seperti realisme dan liberalism. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional adalah Friedrich Kratochwill, John Ruggie, Nicholas Onuf dan Alexander Wendt (Walter, 2015, pp. 200-201).

Alexander Wendt menuangkan tulisanya dalam buku *Collective Identity Formation and The International State*. Konstruktivisme melakukan analisa atas dasar ide atau gagasan terhadap kejadian di dunia internasional. Teori konstruktivisme memberi pandangan berbeda dari teori sebelumnya yang hanya memahami situasi internasional dari hal hal yang sifatnya materil. Kontruktivisme meyakini bahwa adanya negara, perang, sistem internasional, nuklir dan masalah lain yang muncul dalam dunia internasional adalah bentukan dari ide atau gagasan. Menurut Wendt ide atau gagasan akan mempengaruhi adanya pembentukan sistem dengan perilaku para aktornya. Konstruktivisme juga meyakini bahwa terkadang faktor ideasional (pemikiran) memliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatan materi (Wendt A. , 1999, pp. 92-96). Wendt sangat menjunjung tinggi adanya peran

identitas sebagai salah satu faktor yang membentuk kepentingan dari perilaku negara terhadap dinamika struktur dan agen.

> *Constructivism is a structural theory of the interna- tional system that makes the following core claims: (1) states are the principal units of analysis for inter- national political theory; (2) the key structures in the states system are intersubjective, rather than material; and (3) state identities and interests are in important part constructed by these social structures, rather than given exogenously to the system by human nature or domestic politics* (Wendt A. , 1994, hal. 385)**.**

Pernyataan Wendt diatas mengartikan bahwa negara merupakan agen utama dalam sebuah analisis politik internasional. Interaksi sosial antar agen adalah sistem yang membentuk struktur, Identitas dan kepentingan negara merupakan bagian penting yang dibentuk oleh struktur. Dari pernyataan tersebut terdapat tiga poin penting, yaitu: agen, struktur dan identitas. Agen adalah negara yang merupakan subjek utama dalam penelitian. Sedangkan struktur dan Identitas memiliki pengertian yang cukup luas karena terdapat proses pembentukan dan definisi yang berbeda dalam setiap kasus. Secara sederhana, Struktur merupakan sebuah sistem yang terbentuk dari interaksi antar agen di dunia internasional yang dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk dan tercipta melalui identitas agen. Selanjutnya struktur sosial dapat membentuk atau mempengaruhi identitas agen itu sendiri.

Alexander Wendt menekankan pandanganya terhadap filosofis Thomas Hobbes, John Locke dan Immanuel Khant yang bercirikan pada 3 budaya anarki, yaitu Hobbesian sistem tentang perang dan konflik, Lockean Sistem tentang adanya

persaingan, dan Kantian Sistem tentang kerjasama. Ketiga sistem tersebut merupakan prinsip utama Wendt dalam menggambarkan perubahan yang terjadi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan gugurnya sistem Hobbesian setelah perang dingin yang membuat negara memposisikan diri sebagai unit unit dalam dunia internasional sebagai rival dalam mempertahankan diri di kancah internasional. Setelah perang dingin, negara negara mulai berhenti berkonflik dan melakukan kerjasama dalam perkembangan isu internasional dan menciptakan perdamaian. Hal itu membuat lahirnya aktor-aktor baru non-negara yang terlibat dalam interaksi politik internasional (Wendt A. , 1999, pp. 246-248). Pemikiran Wendt melihat peradaban modern saat ini memusatkan pada sistem Lockean dengan adanya persaingan antar negara dan pada sistem Kantian yang melihat negara-negara saat ini memilih untuk saling bekerjasama untuk menguntungkan satu sama lainya.

Salah satu penjelasan yang diungkapkan oleh Wendt dalam menciptakan perdamaian adalah dengan membentuk *collective identity*. Wendt menentang teori Neorealis dari Waltz yang menyatakan bahwa dunia internasional yang anarkis adalah institusi independen yang membentuk tingkah laku negara. Pada dasarnya Wendt setuju bahwa dunia internasional dalam keadaan anarkis, namun Wendt berendapat bahwa pola interaksi antar negara itulah yang membentuk dunia internasional menjadi anarkis. Hal itu yang menyebabkan Wendt berpendapat bahwa dunia internasional yang anarkis bisa saja dihilangkan melalui perubahan pola interaksi antar negara. Menurut Wendt sangat diperlukan definisi *collective identity* yang dibentuk oleh sejauh mana kepentingan itu didefinisikan oleh para aktor. Dalam

situasi anarkis tidak harus diselesaikan melalui penyelamatan diri (*Self-Help*) tetapi perlu adanya perubahan dan pemahaman bersama dalam mendefinisikan arti kepentingan dan keamanan (Wendt A. , 1994, hal. 386-388).

Proses konstruksi intersubjektif mendefinisikan bahwa aktor dapat bertindak secara tidak pasti. Definisi tersebutlah yang mendasari perlunya struktur internasional yang kolektif yang terkadang tidak dapat diubah karena faktor historis dalam pembentukanya. Sehingga struktur internasional tersebut dapat menjadi penghambat bagi agen yang mungkin berubah dan dapat memperkuat identitas agen yang telah berafiliasi dalam struktur. Struktur internasional yang dimaksud adalah institusi yang mengandung sejumlah gagasan atau nilai yang disepakati bersama menjadi sebuah sistem untuk mengatur agen agen didalamnya berupa identitas, prinsip dan hukum. Hubungan struktur dan agen kemudian menjadi dinamika intersubjektif dalam arah yang berbeda seperti agen yang mempengaruhi struktur, atau struktur yang mempengaruhi agen dan saling mempengaruhi atau memperkuat identitas. (Wendt A. , 1994, hal. 389).

Collective identity dalam struktur inetrnasional terjadi dengan perubahan intersubjektivitas antar negara dari budaya lockean menjadi kantian. Integrasi negara dalam membentuk collective identity atau masuk kedalam identitas kolektif yang telah ada merupakan perubahan sikap intersubjektivitas antar negara yang disampaikan oleh Wendt dalam transformasi tiga budaya anarkis yaitu dari *hobbesian system* tentang perang dan konflik, ke *lockean System* tentang adanya persaingan, dan

kantian System tentang kerjasama dan persahabatan. Identitas kolektif sendiri merupakan transformasi akhir yang berbentuk *kantian system* untuk menciptakan intersubjektivitas yang damai dan saling menguntungkan. Berakhirnya Perang Dunia II dan perjanjian Westphalia 1648 membuat sistem Hobbesian gugur dan ditekan menjadi sistem lockean. Penciptaaan dunia yang damai adalah bagaimana negara negara dapat menjalin interaksi dengan budaya kantian (Wendt A. , 1999, hal. 336-343).

Sistem lockean merupakan kondisi hubungan antar negara yang memandang satu sama lain sebagai saingan (*rival*). Keberadaan konflik dalam sistem ini dapat diredam karena pengakuan atas kedaulatan negara dalam perjanjian Westphalia 1648. Kondisi antar negara berada dalam situasi yang tegang atau konfliktual namun tidak melakukan penaklukan satu sama lain ataupun perang karena ada batas kedaulatan yang harus dihargai. Negara dalam sistem ini memiliki National habitus yang dominan. National habitus merupakan identitas nasional berupa budaya, tradisi, nilai dan norma yang dipertahankan dalam globalisasi dan menjadi identitas yang membedakan diri mereka dengan kelompok lain. Sistem tersebut tidak menghilangkan potensi kerja sama karena terdapat tensi yang berbeda beda apakah mendekati hobbesian atau Kantian. Kondisi tersebut didasarkan pada proses perubahan intersubjektivitas antar negara. Negara yang tidak lagi berperang berada dalam budaya lockean namun apabila negara tersebut telah menjalin kerja sama dan membentuk identitas kolektif maka kondisi negara tersebut bertransformasi ke budaya kantian. Kondisi intersubjektivitas negara berada dalam budaya Hobbesian,

lockean atau kantian dapat dilihat dengan intensitas konflik yang terjadi dan melalui "master variable" (Wendt A. , 1999, hal. 279-297).

"master variable" tidak hanya digunakan dalam melihat kondisi negara berda dalam budaya Hobbesian, lockean atau kantian, namun juga dapat menjadi Proses transformasi dari budaya hobbesian atau lockean menjadi kantian dan untuk membentuk identitas kolektif dalam struktur internasional. "Master variable" dibagi menjadi dua jenis variabel, yaitu: Pertama, variabel *Self Restraint* yang menjadi variabel dasar yaitu negara harus mampu menahan diri dalam bertindak. Negara merupakan institusi yang tidak dapat bergerak, melainkan digerakan oleh manusia dan didalam sebuah negara terdapat sebuah rezim yang tercipta dari pemimpin negara. Konstitusi telah diciptakan dilevel mikro oleh sebagian kecil masyarakat yang berkuasa di negara untuk mengatur masyarakatnya. Menurut Wendt diperlukan konstitusi dilevel makro (internasional) untuk mengatur negara karena yang menggerakan negara uga manusia yang dapat berubah sesuai rezim dari negara tersebut. Konstitusi dibentuk oleh aktor aktor berkuasa dari beberapa negara untuk memberi batasan yang jelas bagi aktor didalam negara untuk bertindak. Syarat pertama yang disebutkan oleh Wendt ini merupakan dasar dan variable utama dalam mewujudkan identitas kolektif dalam struktur internasional.

Kedua, adalah tiga variabel efisien, yaitu: interdependence, common fate, dan homogeinity. 1) Interdependence merupakan ketergantungan yang merekatkan hubungan negara negara dalam kerja sama sehingga membentuk intersubjektivitas untuk saling menguntungkan, 2) Common fate merupakan nasib atau ancaman yang

dialami bersama, 3) homogeinity yaitu kesamaan identitas yang mendorong negara satu sama lain untuk saling memahami dan menerima agar negara memandang negara lain sebagai satu kelompok yang sama, atau perbedaan yang ada tidak jauh dan dapat ditoleransi. Untuk mencapai intersubjektivitas dalam budaya kantian, cukup dengan salah satu dari tiga variabel efisien yang digabungkan dengan *self restraint* (pengendalian diri). Namun untuk membentuk identitas kolektif dalam struktur internasional maka kedua jenis dalam "*master variable"* tersebut harus dipenuhi karena identitas kolektif memiliki level intersubjektivitas yang lebih dalam dari budaya kantian dan semakin banyak variabel yang dipenuhi maka semakin dekat dengan identitas kolektif (Wendt A. , 1999, hal. 343).

Dalam proses interaksi internasional antar agen akan didapati sebuah identitas dan kepentingan. Identitas adalah set makna yang diatributkan oleh agen terhadap dirinya sendiri saat memandang agen lain. Agen biasanya memiliki banyak identitas sosial, namun disisi lain identitas sosial itu sendiri memiliki sifat struktural individu dan sosial. Sehingga agen dapat menentukan 'siapa saya' sebagai identitas individu terhadap sosial yang ada, atau 'siapa kita' dalam skema struktur identitas sosial terhadap agen atau identitas sosial yang lain. Dengan konsepsi identitas tersebut, tindakan atau kebijakan suatu negara terhadap negara lain akan ditentukan melalui proses interaksi yang terjadi, apakah akan memandang negara lein sebagai rival atau kawan (Wendt A. , 1994, hal. 385-386).

Jerman dan Turki mungkin saja menjalani kerja sama sebagaimana budaya kantian, namun saat Jerman mendefinisikan diri sebagai “kami” dalam identitas kolektif Uni Eropa dan menanggapi Turki yang berusaha masuk menjadi anggota Uni Eropa, maka Turki tidak hanya memenuhi self-restraint dan salah satu dari tiga variabel efisien, namun Turki harus memenuhi seluruh variabel dalam “master variable”. Hal ini menjawab bagaimana sebelum dimulainya negosiasi Turki menjadi anggota Uni Eropa, Jerman dan Turki dapat menjalin hubungan bilateral yang cukup baik dalam kerja sama ekonomi dan militer.

Penolakan Jerman terhadap keanggotaan Turki di Uni eropa dikarenakan Jerman mendefinisikan dirinya sebagai “kami” dalam konteks identitas kolektif Uni eropa dan memandang Turki sebagai rival. Alasan Jerman menolak Turki dibagi menjadi dua bagian analisis, yaitua: pertama, Pandanganya Jerman terhadap Turki sebagai rival yang didasarkan pada kemampuan Turki dalam memenuhi *copenhagen criteria* dan *acquis criteria* yang merupakan turunan dari konstitusi Uni Eropa. kriteria tersebut dibentuk oleh Uni Eropa untuk mengatur calon anggota agar dapat menahan diri dalam menjalankan kebijakan baik dalam maupun luar negeri agar tidak melewati batas pinsip dan nilai nilai Uni Eropa sebelum berintegrasi secara resmi kedalam Uni Eropa. kedua, Jerman memandang Turki sebagai rival yang didasarkan pada konflik bilateral yang terjadi dan intersubjektivitas Turki dengan Jerman dan Uni Eropa yang dilihat dari tiga variabel efisien dalam master variabel.

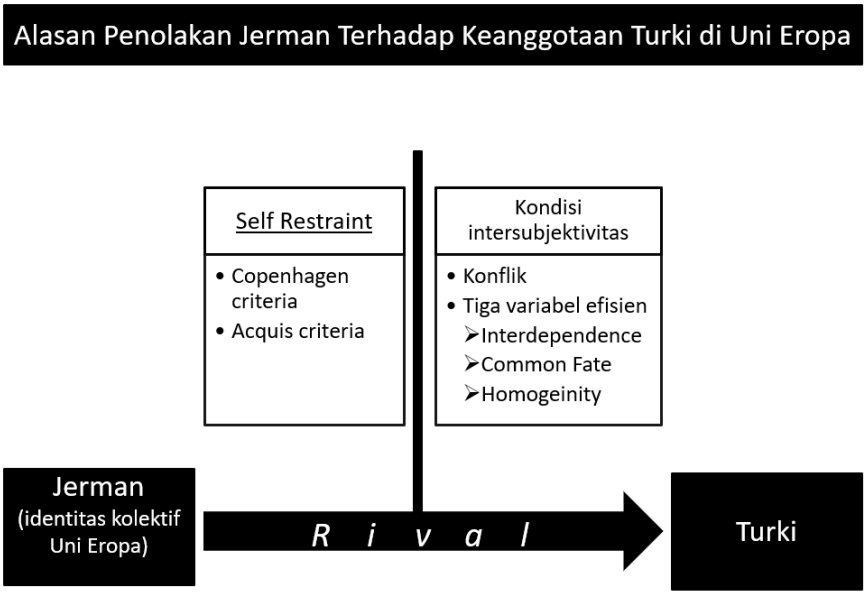

Gambar 1 bagan penolakan Jerman terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk menganalisa penolakan Jerman terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenoma, aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dari beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan (Hamdi, 2014, hal. 18). Hal ini mengandung pengertian bahwa penelitian kualitatif mempelajari sesuatu dalam setting apa adanya, berusaha untuk membuat deskripsi obyektif, phenomena sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh subyek. Metode kualitatif digunakan dalam

penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci (Sugiyono, 2009, hal. 15-20). Maka jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan deskripsi atau narasi berupaya menggambarkan kejadian dan fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

1.8.2 Subjek Penelitian

proses perluasan keanggotaan Uni Eropa dalam penelitian ini tertuju pada calon anggota yang masih dalam tahap negosiasi yaitu Turki dimana dalam prosesnya, negara negara nggota Uni Eropa masih belum bisa menyetujui masuknya Turki, dalam penelitian ini Jerman sebagai negara yang berpengaruh di Eropa menjadi subjek penelitian dimana posisi dan sikapnya sangat berpengaruh dalam proses keanggotaan Turki di Uni Eropa dan Jerman adalah negara di Uni Eropa yang menjadi mitra kerjasama besar bagi Turki.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data pada tulisan ini akan menggunakan library research atau kepustakaan yang kegunaanya untuk membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu diulas kembali atau ditambahkan pada penelitian selanjutnya. Kepustakaan juga mampu mengidentifikasi para peneliti dalam memperoleh data, menghubungkan konsep teoritis dan ide-ide. Ada beberapa strategi dalam membaca

untuk membuat library research yaitu; 1) *skimming* adalah penulusuran yang tepat pada sumber data buku atau teks dengan meninggalkan bagian-bagian yang tidak relevan, 2) *Sampling* yaitu melibatkan pembacaan paragraf awal dan terakhir dalam sebuah bab atau artikel dan kalimat utama dan terakhir dari masing-masing paragraf, 3) *Previewing* merupakan metode yang guna mendapatkan pemahaman umum atas keseluruhan teks sebagai persiapan untuk membaca lebih intensif. Data yang diperoleh dari metode kualitatif dapat berupa observasi, wawancara, serta data pendukung lainnya berupa buku, artikel dan sumber lainnya diinternet (Daymon, 2007, hal. 55-60).

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini proses yang akan dilakukan adalah proses analisis dari sumber data yang didapatkan melalui teknik *library search* yang diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk melihat permasalahan mengenai proses keanggotaan Turki di Uni Eropa yang terkesan berlarut larut dan mengalami keraguan terkait diterima atau tidaknya Turki di Uni Eropa.